

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta, 1984.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Cetakan Pertama, Solusi Publishing, Depok, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining & Defferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010.
- Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung : Grafiti, 2006

- I Made Pasek Diantha, *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, November 2017.
- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing: Malang, 2007.
- Lilik Mulyadi., *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2020.
- M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- M.W. Patti Peilohy, *Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Mengenai Pembayaran Uang Pengganti*, Bagian I, Dipajaya, Ujung Pandang, 1994.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Muhammad Rofik, Skripsi: *“Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Keuangan Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)”*, Magelang: Universitas Muhammadiyah, 2017.
- Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet 6*, Kencana, Jakarta, 2010.
- P Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, , 2020.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2008.

- Rihantoro Bayuaji, *“Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang”* Surabaya, Laksbang Justisia, 2019.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Setyo Utomo, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kesatu, PT. Sofmedia, Jakarta, 2014.
- Simorangkir, Rudy T Erwin, Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Supardi S. *“Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana yang berkeadilan”* Jakarta; Prenamedia Group, 2018.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta : Rajawali Press, 2007.
- Theodarus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Tim Garda Tipikor. *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016.
- Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, PT. Kompas Media Nusantara, Ctk Kesatu, Jakarta, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- , *Perbuatan Melanggar Hukum*, Vorkink-Von Hoeve. Bandung.
- Zainal Abidin Farid, *“Hukum Pidana I”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017.

II. JURNAL

- Ade Mahmud, *Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 3 No. 2* – Desember 2017.

Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti Dengan Pidana Subsider Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Pamulang Law Rewview*, Volume 6 Issue 1, Agustus 2023.

Audifirdha Meilytia, Elly Sudarti, Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 4 Nomor 2, 2023.

BPKP, PSP : Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasikan Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara, Juni 1996.

Diding Rahmat, Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 8 No. 1, April 2020.

Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi, Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap, *Pandecta*. Volume 16. Number 1. June 2021.

Fontian Munzil, dkk, “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pegganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomi Negara dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 22, No 1, 2015.

Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016.

Indra Hafid Rahman, Agna Susila, dan Jhony Krisnan, Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Varia Justicia*, Vol. 12 No. 1, Maret 2016.

Mungki Hadipratikto, “Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2012, ISSN: 0216-2091, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura.

Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali dan Mahfud, *Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, Banda Aceh, Agustus 2016

- Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, Andi Najemi, Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2020
- Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi, Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi Vol. 19, No. 2, Agustus, 2017*.
- Pavlidis, G. Towards More Responsible International Asset Recovery: The European Union Should Lead the Way. *New Journal of European Criminal Law*, 9(3), 300–307., 2018.
- Puteri Hikmawati, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, 2020*.
- Putu Aditya Witanaya Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1 – April 2021.
- Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa, Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019.
- Saut Mulatua, Ferdricka Nggeboe, Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Legalitas Edisi Juni Volume IX Nomor 1*, 2017.
- Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi. “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti” , *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 1, Nomor 1, 2020.

Siti Aisyah, Atikah Rahmi, Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

Tri Nada Sari, Elly Sudarti, Yulia Monita, Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, *PAMPAS: Journal of Criminal* Volume 2 Nomor 2, 2021.

Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” , *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3*, 2020.

Wendy, Andi Najemi *Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi* PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1, Nomor 1, 2020.

Yuda Musatajab, Mulyadi A. Tajuddin, Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Restorative Justice* Vol. 2 No 1, Mei 2018.

III. PERUNDANG-UNDANGAN

_____.Undang-Undang *Tentang Kitab Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 1 Tahun 1981. LNRI Nomor 76. Tambahan LNRI Nomor 3209.

_____.Undang-Undang *Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana*. UU Nomor 1 Tahun 1946.

_____.Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

IV. SURAT

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-012/A/Cu.2/01/2013, tanggal 18 Januari 2013.